



## Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024

Anggun Prasiwi<sup>1\*</sup>, Gladys Lhexya Faradhila<sup>2</sup>, Mila Zulficka Dewi<sup>3</sup>,  
Adinda Zakiya Putri Rahmandhani<sup>4</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email: [anggunprasiwi01@gmail.com](mailto:anggunprasiwi01@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [gladyslhexya@gmail.com](mailto:gladyslhexya@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dewimila512@gmail.com](mailto:dewimila512@gmail.com)<sup>3</sup>, [adindazakiya123@gmail.com](mailto:adindazakiya123@gmail.com)<sup>4</sup>

Alamat: Jl. Mayor Sujadi Timur No.46, Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [anggunprasiwi01@gmail.com](mailto:anggunprasiwi01@gmail.com)

**Abstract.** *This study discusses the role of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Tax (BBNKB) in supporting the increase in Regional Original Revenue (PAD) of East Java Province for the period 2020 to 2024. This study uses a descriptive quantitative approach. The data used are secondary data obtained from the government. The study results indicate that PKB consistently contributes significantly to PAD, with an average of 43.78%, which falls into the category of highly contributing. Meanwhile, BBNKB shows a fairly stable contribution of 22.74%, categorized as moderately contributing. Both types of taxes serve as the backbone of local revenue, particularly in the context of fiscal autonomy and strengthening local development capacity. This study recommends the need to optimize local tax strategies, including improving service delivery and taxpayer compliance, to ensure that PAD revenue continues to grow sustainably.*

**Keywords:** *Motor Vehicle Tax, Ownership Transfer Fee, Regional Revenue, Tax*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas peran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur pada periode 2020 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan ialah data sekunder yang berasal dari pemerintahan. Hasil studi menunjukkan bahwa PKB secara konsisten memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD, dengan rata-rata 43,78%, yang termasuk dalam kategori sangat berkontribusi. Sementara itu, BBNKB menunjukkan kontribusi yang cukup stabil yaitu 22,74%, yang dikategorikan cukup berkontribusi. Kedua jenis pajak ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah, terutama dalam konteks kemandirian fiskal dan penguatan kapasitas pembangunan daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi strategi pajak daerah, termasuk peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, agar penerimaan PAD dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak

### 1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kebebasan untuk mengambil inisiatif dalam mengatur dan memaksimalkan sumber daya daerahnya sehingga potensi daerah dapat berkembang secara maksimal (Dwiyanto Pamungkas & Julika Utami, 2024). Dalam era otonomi daerah, pemerintah di suatu daerah dituntut melakukan peningkatan kemandirian fiskalnya sebagai upaya mendukung pembangunan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu instrumen utama dalam mendukung kemandirian fiskal yaitu melakukan optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari potensi lokal, termasuk di bidang perpajakan. PAD adalah pemasukan yang didapatkan pemerintahan daerah melalui penyelenggaraan fungsi pemerintah, penyediaan layanan terhadap masyarakat serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki

oleh wilayah tersebut (Anggoro, 2017). Berdasarkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD ialah penerimaan yang diperoleh suatu daerah baik dari redistribusi daerah, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber penerimaan sah lainnya yang menjadi hak suatu daerah. Di samping itu juga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari dana perimbangan yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber melalui pajak daerah memegang kontribusi bagi pembiayaan pemerintah dan meningkatkan laju pembangunan daerah dikarenakan pajak daerah tidak hanya menaikkan PAD tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Bidullah, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, definisi dari pajak daerah diartikan sebagai kewajiban dibebankan kepada wajib pajak atau kompensasi yang diberikan secara langsung, serta dioptimalkan guna membiayai keperluan daerah dan juga agar dapat meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. (Massie et al., 2024). Terdapat dua jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan kepada individu maupun badan atas kepemilikan kendaraan bermotor, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibebankan apabila terjadi perpindahan kepemilikan kendaraan baik karena transaksi jual beli, maupun pertukaran, maupun hibah (Islami & Rahmawati, 2020).

Provinsi yang menempati posisi teratas dalam perolehan PAD yaitu Provinsi Jawa Timur dengan populasi penduduk mencapai 4,4 juta penduduk pada tahun 2023 (<https://jatim.bps.go.id/id>). Pembangunan dan pemberian fasilitas yang ada merupakan dampak dari wajib pajak membayar pajak setiap tahunnya. Banyaknya populasi yang ada di Provinsi Jawa Timur akan berdampak pada banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh penduduk, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor semakin banyak pula jumlah pajak yang akan di terima oleh pemerintah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencerminkan peran penting sektor pajak kendaraan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dilihat dalam Laporan Realisasi Pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kontribusi PKB dan BBNKB kepada PAD selama lima tahun terakhir menempati posisi teratas dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Dalam

sektor pajak kendaraan, Provinsi Jawa Timur mempunyai peluang yang besar di bidang ini. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan total kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia hingga mencapai 26.527.254 unit. Namun demikian dinamika kontribusi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan dan perubahan kebijakan. Terjadinya pandemic Covid-19 mulai mewabah pada awal tahun 2020 telah membawa pengaruh yang signifikan pada kondisi perekonomian dan penerimaan daerah, khususnya pada sektor perpajakan kendaraan. Pemerintah daerah sempat menerapkan kebijakan relaksasi seperti pemutihan denda pajak juga diskon pokok BBNKN guna upaya meringankan beban masyarakat.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk menganalisis peran serta kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). (Altrio & Saad, 2023) melakukan studi di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengukur tingkat pertumbuhan serta kontribusi PKB, PBBKB, dan BBNKB terhadap PAD pada periode 2015-2019. Hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi PKB di Jawa Barat tergolong cukup baik, dengan rata-rata kontribusi sebesar 36,54% per tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan menegaskan pentingnya kesinambungan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan. Sementara itu, Palyama et al. (2023) menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Gorontalo yang hanya mencapai rata-rata 39,37%, meskipun Tingkat kepemilikan kendaraan semakin meningkat setiap tahunnya. Rendahnya kepatuhan ini menyebabkan ketimpangan antara potensi penerimaan dan realisasi PKB. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi serta peningkatan pelayanan dan sosialisasi pajak.

Terakhir, penelitian oleh Apriani dan Dali (2023) yang fokus pada pajak hiburan di Kota Bogor memperlihatkan bahwa efektivitas penerimaan pajak mencapai 92,35% (kategori efektif), namun kontribusinya terhadap PAD sangat rendah yaitu 2,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua jenis pajak memiliki peran signifikan terhadap PAD, tergantung pada karakteristik dan potensi daerah tersebut.

Kontribusi yang berdampak signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memungkinkan Provinsi Jawa Timur untuk mengelola keuangannya secara mandiri, tanpa harus ketergantungan pada bantuan maupun dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian mencakup kemampuan untuk merencanakan dan mengelola berbagai sumber pendapatan secara optimal dan efektif. Semakin tingkat kemandirian suatu provinsi tinggi, maka semakin tangguh pula daya tahan

ekonominya dalam menghadapi berbagai dinamika perekonomian, baik di tingkat nasional ataupun global, seperti fluktuasi pengeluaran pemerintah, pelemahan pasar, serta tantangan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah (Islami & Rahmawati, 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengukur besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir. Hasil analisis ini diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi dan perumusan strategi kebijakan pajak daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan, serta memberikan masukan yang konstruktif bagi penguatan kapasitas fiskal daerah di masa mendatang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah salah satu komponen sumber pendapatan daerah menurut Pasal 79 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, dan mencakup pendapatan yang diperoleh melalui pemungutan yang diatur oleh undang-undang daerah yang berlaku (Asih & Irawan, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi secara signifikan dalam membiayai pembangunan daerah. Keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup menawarkan kemudahan serta fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana daerah (Dhamayanti, 2025). Sektor pendapatan daerah mempunyai peran signifikan karena menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai aktivitas pemerintah dan melaksanakan program pembangunan daerah guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kemajuan dan pertumbuhan dari suatu daerah sangat mengandalkan kemampuan daerah tersebut untuk memaksimalkan potensi yang terdapat pada pendapatan asli daerahnya (Bidullah, 2022).

### **Pajak Daerah**

Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD yang perlu dioptimalkan pengelolaannya. (Nara Bangsawan et al., 2024). Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak atau badan tanpa menerima imbalan yang setara secara langsung, ini bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan bahwasannya pajak daerah harus

dibayar oleh individu atau badan tanpa memperoleh manfaat secara langsung, serta dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Miswar et al., 2021). Merujuk pada UU No.34 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Kategorisasi ini didasarkan pada hak masing- masing daerah dalam menetapkan serta memungut pajak daerah sesuai dengan wilayah administratif provinsi serta kabupaten/kota yang bersangkutan (Ester Rompis et al., 2015).

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sendiri didefinisikan sebagai alat transportasi beroda, beroperasi di daratan serta digerakkan oleh alat teknis berupa mesin yang memanfaatkan sumber energi tertentu, seperti bensin (Gustaviana, 2020). Tarif pajaknya sendiri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang berperan sebagai pihak pemungut pajak. Untuk kepemilikan pertama, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 2%, sementara kepemilikan kedua, pajaknya ditetapkan secara progresif mulai dari 2,5% hingga maksimum sebesar 10%. Adapun kendaraan bermotor lainnya seperti transportasi umum, mobil pemadam kebakaran, ambulans, serta kendaraan milik lembaga sosial, keagamaan, pemerintah, TNI dan polisi, dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0,5%. Sedangkan untuk penggunaan alat berat, tingkat paling tinggi sebesar 0,20% (Teruna Awaloedin et al., 2020). Dasar perhitungan untuk Pajak Kendaraan Bermotor sendiri ditetapkan berdasarkan perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan faktor bobot yang menggambarkan tingkat kerusakan jalan yang relatif serta dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor (Rizal & Hidayah, 2018).

### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang dikenakan akibat adanya penyerahan atau perubahan kewenangan kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat terjadi karena kesepakatan dua belah pihak, keputusan satu pihak, ataupun kondisi tertentu yang muncul karena adanya kegiatan penjualan pembelian, tukar menukar, hibah, warisan, ataupun pengalihan kepemilikan kepada badan usaha.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah, menjelaskan bahwasannya pemungutan BBNKB) dilakukan melalui perkalian dari tarif yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak. Untuk penyerahan

pertama, tarif pajak yang ditetapkan yakni sebesar 15% sedangkan penyerahan kedua dan selanjutnya dikenai tarif sebesar 1%. Tarif pajak BBNKB untuk kendaraan bermotor seperti alat berat dan besar saat penyerahan pertamanya dikenai sebesar 0,75% sedangkan untuk penyerahan kedua serta selanjutnya sebesar 0,075%. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah dasar dari pengenaan pajak BBNKB (Husaini, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini memakai metode kuantitatif deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kontribusi dua jenis pajak daerah utama, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di Jawa Timur. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis berupa angka statistik dalam bentuk laporan realisasi penerimaan pajak dan PAD yang bersifat numerik dan dapat dianalisis secara matematis dan statistik.

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu keadaan yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data menggunakan kombinasi berbagai teknik triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kuantitatif berfokus pada pemaknaan daripada generalisasi. Sementara itu, Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang detail dan sistematis terkait suatu fenomena yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, yakni tahun 2019 hingga 2023.

Di sisi lain, penelitian ini juga memaparkan analisis tren mengenai pertumbuhan PKB, BBNKB, dan PAD di setiap tahunnya yang secara opsional bisa melakukan analisis regresi linear sederhana guna mengetahui sejauh mana pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD secara statistik.

#### **Sumber Data**

Penelitian ini memakai data sekunder yang didapatkan dari sumber resmi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur. Data tersebut mencakup pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahunan untuk periode 2020 sampai dengan 2024.

Data sekunder dipilih karena memberikan gambaran yang valid dan representatif terkait realisasi penerimaan pajak daerah, mengingat sumber resmi memiliki standar pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Data Sekunder diperoleh dari web resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur <https://bapenda.jatimprov.go.id/> dengan melibatkan sebanyak 10 data.

Untuk menghitung persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD Provinsi Jawa Timur, Penulis melakukan analisis data menggunakan perbandingan yaitu.

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

Untuk menghitung persentase kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD Provinsi Jawa Timur, Penulis melakukan analisis data menggunakan perbandingan yaitu.

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100$$

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik studi dokumentasi (*documentation study*) yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah beberapa dokumen resmi. Dokumen yang dikaji mencakup laporan tahunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), laporan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur atau instansi terkait.

Proses pengumpulan data juga melibatkan permintaan data kepada instansi pemerintah melalui prosedur resmi untuk mendapatkan dokumen yang lengkap dan valid (Widya, 2023).

Menurut Nazir (2017) studi dokumentasi sangat berguna untuk memperoleh data historis dan faktual yang sudah ada, sementara studi kepustakaan diperlukan untuk membangun dasar teori yang kuat.

Tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui dari kriteria kontribusi Pajak Terhadap PAD dibawah ini.

**Tabel 1. Kriteria Kontribusi Pajak Terhadap PAD**

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Kurang Berkontribusi
10,10%-20%	Kurang Berkontribusi
20,10%-30%	Cukup Berkontribusi
30,10%-40%	Berkontribusi
40,10%-50%	Sangat Berkontribusi

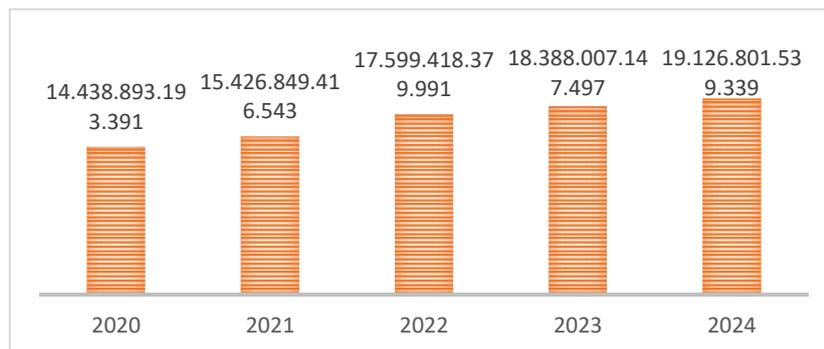
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Sudarmono Hadi,2022)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024**

Tahun	Target	Realisasi
2020	12.398.000.000.000	14.438.893.193.391
2021	14.248.429.290.118	15.426.849.416.543
2022	15.067.320.643.080	17.599.418.379.991
2023	18.125.425.000.000	18.388.007.147.497
2024	17.262.067.027.007	19.126.801.539.339

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Timur



**Gambar 1. Grafik Realisasi PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024**

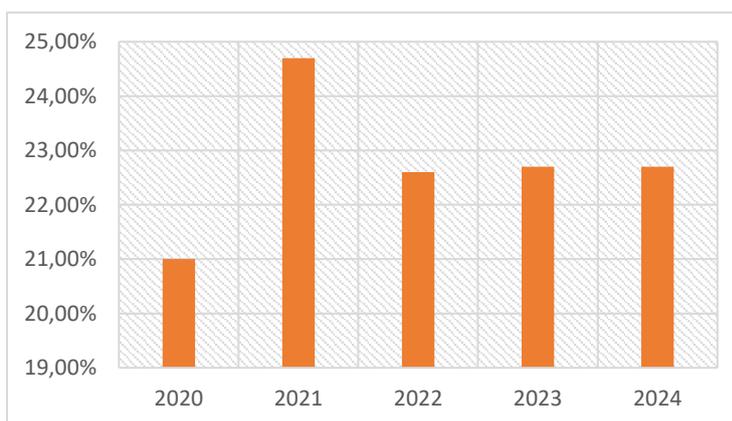
Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada tabel 2, Data ini menguraikan target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai dalam hal Pendapatan Asli Daerah pada periode 2020–2024. Data tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Setiap tahunnya dilakukan perbandingan dengan sasaran yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan tabel realisasi tersebut terlihat bahwasannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat kinerja fiskal daerah yang positif karena mampu melampaui ekspektasi penerimaan meskipun di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, termasuk saat pandemi COVID-19 yang sempat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

**Tabel 3.** Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024

Tahun	PAD	PKB	Persentase	Kategori
2020	14.438.893.193.391	6.566.187.985.216	45,5 %	Sangat Berkontribusi
2021	15.426.849.416.543	6.874.180.353.260	44,6%	Sangat Berkontribusi
2022	17.599.418.379.991	7.621.089.134.945	43,3%	Sangat Berkontribusi
2023	18.388.007.147.497	7.782.571.000.310	42,3%	Sangat Berkontribusi
2024	19.126.801.539.339	8.262.123.514.153	43,2%	Sangat Berkontribusi

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Timur

**Gambar 2.** Grafik Kontribusi Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024

Berdasarkan pada data tabel 3, hasil analisis perhitungan diperoleh kesimpulan bahwasannya persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 – 2024 tergolong sangat besar yaitu berada di atas 40.10%. Dalam tahun 2020 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan persentase sebesar 45.5%. Selama tahun 2021 persentase menurun sebesar 0.9%. Tahun 2022 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kembali turun sebesar 1.3%. Lalu di tahun 2023 kembali mengalami penurunan persentase sebesar 1%. Kemudian tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0.9%. Dengan demikian, hasil kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor dalam penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur pada periode 2020 - 2024 dengan rata-rata 43,78% dapat dikategorikan 40.10% - 50% artinya sangat berkontribusi.

**Tabel 4.** Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024

Tahun	PAD	BBNKB	Persentase	Kategori
2020	14.438.893.193.391	3.022.188.308.4	21%	Cukup Berkontribusi
2021	15.426.849.416.543	3.807.178.988.9	24,7%	Cukup Berkontribusi
2022	17.599.418.379.991	3.975.651.734.3	22,6%	Cukup Berkontribusi
2023	18.388.007.147.497	4.166.317.985.2	22,7%	Cukup Berkontribusi
2024	19.126.801.539.339	4.340.905.816.7	22,7%	Cukup Berkontribusi

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada hasil analisis perhitungan data pada tabel 4, diperoleh kesimpulan bahwa persentase yang diberikan oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam menopang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur selama periode 2020 – 2024 tergolong cukup besar yaitu berada di atas 20.10%. Tahun 2020 persentase kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah 21%. Di tahun 2021 persentase kontribusi BBNKB mengalami kenaikan sebesar 3.7%. Akan tetapi, pada tahun 2022 persentase kontribusi mengalami penurunan sebesar 2.1%. Kemudian pada tahun 2023 persentase kontribusi mengalami kenaikan kembali sebesar 0.1% dan yang Terakhir persentase kontribusi BBNKB pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023. Dengan demikian, hasil kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur periode 2020 - 2024 dengan rata-rata 22.74% dapat dikategorikan 20.10% - 30% artinya cukup berkontribusi.

Apabila ditinjau lebih dalam pada Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2020 – 2024, menunjukkan adanya tren peningkatan yang berkelanjutan selama lima tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2020 penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur yaitu senilai Rp 14.438.893.193.391 masih menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024 mencapai Rp 19.126.801.539.339. Namun, jika dikaitkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PKB tercatat sebagai salah satu komponen penyumbang utama dalam kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Ini dikarenakan seluruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masuk ke kas daerah provinsi, sehingga besar kecilnya penerimaan PKB sangat menentukan besarnya total PAD. Selain itu PKB dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor, menjadikannya aliran pendapatan rutin daerah setiap tahunnya. Jika setiap tahun peningkatan jumlah kendaraan bermotor tinggi, maka potensi penerimaan PKB pun akan mengalami peningkatan. Di sisi lain, Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut dikarenakan hanya dikenakan saat dilakukan perpindahan kepemilikan kendaraan dan bersifat incidental. Apabila transaksi jual beli kendaraan menurun atau bahkan banyak kendaraan tidak dilaporkan balik nama, maka akan berpotensi penurunan pada penerimaan BBNKB.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis bahwasannya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara konsisten memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata persentase mencapai 43,78%. Sementara itu, kontribusi dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berada dalam kategori cukup berkontribusi, dengan rata-rata 22,74%. Peningkatan penerimaan PAD di setiap tahunnya juga menunjukkan bahwa sektor perpajakan kendaraan bermotor menjadi salah satu andalan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, terdapat dinamika yang perlu diperhatikan, seperti penurunan kontribusi akibat pandemi dan kebijakan pemutihan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan strategi yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya melalui digitalisasi layanan dan peningkatan edukasi wajib pajak, guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan penerimaan daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- Altrio, R. F., & Saad, B. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan Kontribusi PKB, PBBKB, dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus terhadap pada Jawa Barat dan DKI Jakarta Periode Tahun 2015 - 2019). *Jurnal of Accounting, Management, and Islamic Economics*, 1(2), 469–478. <https://doi.org/https://doi.org/10.35384/jamie.v1i2.464>
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 180–181.
- Bidullah, T. (2022). Analisis Pengaruh Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 134. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i2.317>
- Dhamayanti, Y. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Katering Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.25273/jap.v3i1.21926>
- Ester Rompis, N., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 51–62.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 25.

- Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Jurnal Profit*, 14(2), 50.
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2(3), 155–156.
- Nara Bangsawan, R., Sahade, & Ridwan Tikollah, M. (2024). Analisis Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Takalar. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7, 39. <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/dedikasi/article/download/4441/4310>
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Teruna Awaloedin, D., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 219.